



IPB Today

Volume 399 Tahun 2020

UTBK Digelar, IPB University Terapkan Protokol COVID-19 Secara Ketat



Tahun ini, IPB University kembali ditunjuk menjadi salah satu Pusat Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT). Berbeda dengan tahun sebelumnya, pelaksanaan UTBK tahun ini diberlakukan protokol kesehatan secara ketat mengingat pelaksanaan tes masih dalam kondisi pandemi COVID-19.

Sehubungan dengan pandemi ini peserta yang diijinkan mengikuti tes hanya yang berdomisili di Kabupaten maupun Kota Bogor. Hal ini berdasarkan Surat Walikota Bogor tertanggal 24 Juni 2020 berkaitan dengan masih berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan dikuatkan oleh surat dari Sekda Provinsi Jawa Barat selaku Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 di Jawa Barat tanggal 1 Juli 2020.

Peserta yang tidak diijinkan mengikuti tes di Pusat UTBK IPB University telah diberitahu sebelumnya melalui email, website UTBK-IPB dan helpdesk yang disediakan. Para peserta tersebut diminta untuk tidak hadir dan mengisi formulir online untuk pendataan kembali informasi domisili. Data tersebut akan disampaikan kepada LTMPT untuk kemudian peserta akan direlokasi ke tempat tes yang lebih dekat dengan domisili masing-masing pada tanggal 20-24 Juli 2020. Dengan demikian hal ini hanya merupakan penundaan waktu tes saja.

Penanggung Jawab: Yatri Indah Kusumastuti **Pimpinan Redaksi:** Siti Nuryati **Redaktur Pelaksana:** Rio Fatahillah CP
Editor : Siti Zulaedah, Rosyid Amrulloh **Reporter :** Dedeh H, Awaluddin, Rizki Mahaputra **Fotografer:** Cecep AW, Bambang A, Rifqi Wahyudi **Layout :** Dimas R, M Rifki Ihsan **Alamat Redaksi:** Biro Komunikasi IPB Gd. Andi Hakim Nasoetion, Rektorat Lt. 1, Kampus IPB Dramaga Telp. : (0251) 8425635, **Email:** humas@apps.ipb.ac.id



@ipbofficial



@ipbofficial



@ipbuniversity



@ipbuniversity



www.ipb.ac.id

Peserta yang berasal dari luar Bogor maupun yang tidak dapat hadir UTBK dengan alasan keselamatan, akan dilakukan penempatan kembali (relokasi) UTBK di Kabupaten/Kota asal atau lokasi terdekat domisili peserta. IPB University sebagai salah satu Pusat UTBK telah menyampaikan informasi relokasi untuk peserta dari luar Bogor ini melalui email ke masing-masing peserta UTBK.

Peserta keseluruhan yang akan melaksanakan UTBK di Pusat UTBK IPB University sebanyak 14.893 orang. Pelaksanaan Tes UTBK di IPB dilaksanakan pada tahap pertama, 5-14 Juli 2020. Pelaksanaan tes pada masing-masing hari dibagi menjadi dua sesi yaitu sesi pagi pukul 8.15-11.15 dan sesi siang pukul 13.15-16.15. Pada hari pertama, sebanyak 2.854 peserta di Pusat UTBK-IPB telah mengikuti ujian.

Pelaksanaan UTBK di bawah koordinasi IPB University tersebar di 19 titik yaitu Kampus IPB Dramaga, Kampus IPB Cilibende, Kampus IPB Gunung Gede dan Sekolah Mitra IPB yaitu SMAN 1 Bogor, SMAN 5 Bogor, SMK Informatika Pesat, SMAS YPHB, SMKS Bina Mandiri Bogor, SMAN 10 Bogor, MAN 2 Kota Bogor, SMKN 2 Bogor, SMAN 3 Bogor, SMAN 1 Bogor, SMAN 2 Bogor, SMKN 3 Bogor, SMKN 1 Cibinong, SMKS PGRI 3 Bogor, SMAN 1 Rancabungur, dan SMKN 1 Ciomas.

Pada pelaksanaan tes hari pertama, Rektor IPB University, Prof Dr Arif Satria berkesempatan mengunjungi lokasi tes di Kampus IPB Cilibende. Rektor berharap UTBK bisa berjalan dengan lancar hingga di hari terakhir pelaksanaan. "Meskipun masih di suasana pandemi COVID-19, kita berharap pelaksanaan UTBK berjalan dengan lancar, tertib dan aman," ungkapnya.

Penerapan protokol kesehatan saat pelaksanaan UTBK di IPB University dilakukan sejak peserta tes memasuki lokasi ujian baik di lingkungan kampus maupun di lokasi mitra yaitu beberapa sekolah di Kota/Kabupaten Bogor. Peserta tes diwajibkan memakai masker sejak dari rumah, face shield sebelum memasuki lokasi ujian serta tetap melakukan physical distancing. Peserta tes juga

dianjurkan memakai sarung tangan serta face shield selama tes berlangsung. Sarung tangan plastik disediakan oleh Pusat UTBK-IPB University. Protokol kesehatan ini telah diinformasikan kepada peserta pada hari-hari sebelum pelaksanaan ujian.

Di samping itu, peserta juga diwajibkan langsung pulang ke tempat tinggal masing-masing sesuai mengerjakan tes.

Sejumlah tenaga medis dan paramedis yang dikoordinasikan oleh IPB University bekerjasama dengan rumah sakit dan sekolah ditugaskan di masing-masing lokasi ujian. **(RA/sn)**



Tim Patroli Terpadu Libatkan Masyarakat dalam Pencegahan Karhutla



Fakultas Kehutanan IPB University menggelar webinar Fahutan Talk Series 3 bertajuk “Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Sudah Dilakukan?” (4/7). Dekan Fakultas Kehutanan, Dr Rinekso Soekmadi mengatakan, webinar series tersebut dijadikan sebagai wahana bagi civitas Fahutan IPB University untuk mengekspresikan kepeduliannya terhadap isu-isu terkini mengenai hutan Indonesia dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) termasuk ke dalamnya.

Kegelisahan masyarakat yang tak henti-hentinya bergulat dengan karhutla masih menjadi tantangan tersendiri bagi akademisi bahkan pemerintah. Dalam kesempatan tersebut, Prof Dr Bambang Hero Saharjo, dosen IPB University yang merupakan guru besar bidang Perlindungan Hutan, Fakultas Kehutanan ingin mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik karhutla berdasarkan data lapangan.

Dibandingkan dengan fakta di lapangan dan hasil penelitian akademisi, ternyata pengendalian yang dilakukan oleh otoritas setempat belum dilaksanakan dengan baik. Bahkan audit kepatuhan pengendalian kebakaran hutan terhadap korporasi dan pemerintah terkait masih menjadi tanda tanya. Pelaporan rutin terhadap aktivitas perkebunan atau kehutanan juga masih belum dilakukan secara optimal sehingga deteksi dini menjadi wacana saja.

Sementara itu, Dr Raffles Brotestes Panjaitan, Tenaga Ahli Menteri Bidang Manajemen Landscape Fire, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatakan jika ingin pencegahan karhutla dapat berjalan optimal, perlu adanya perubahan paradigma dengan melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan karhutla yang bersinergis dengan pemerintah.

Pembentukan tim Patroli Terpadu menjadi salah satu bentuk pencegahannya dengan melibatkan tokoh masyarakat di tingkat tapak didampingi dengan aparat pemerintah. Deteksi dini hotspot pada daerah rawan terjadi karhutla dapat segera dilaporkan oleh tim tersebut.

Langkah tersebut termasuk ke dalam bentuk manajemen “Landscape Fire” yang sedang dikembangkan pemerintah. Selain itu, modifikasi cuaca hingga kebijakan pembukaan lahan untuk kearifan lokal turut dikaji sebagai upaya pencegahan karhutla secara permanen. Selain itu penguatan kapasitas lapangan dengan dukungan teknis juga akan digalakkan. “Sebenarnya di pemerintah Provinsi sudah ada UPT-UPT dan KPH perlu melakukan pelatihan-pelatihan terutama untuk daerah gambut. Kita akan melakukan training kepada pemerintah daerah mengenai water balance management,” ujarnya.

Pemantauan secara digital pun menjadi solusi yang kekinian dan efektif, khususnya bagi daerah terpencil. Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh, LAPAN, Dr M Rokhis Khomarudin, mengatakan bila penggunaan satelit penginderaan jauh telah dikembangkan untuk pencegahan karhutla. Informasi hotspot yang diterima dapat diakses melalui website sehingga mudah bagi pemantauan dari berbagai daerah. **(MW/Zul)**

Pengembangan Agribisnis di Perhutanan Sosial Bisa Bantu Kekurangan Pangan



Hutan dalam rangka pelestarian perlu dimanfaatkan secara majemuk seperti hasil hutan berupa kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan. Dalam waktu yang sama, kebutuhan majemuk manusia juga perlu ditingkatkan kesejahteraannya. Dua sisi ini perlu ada titik keseimbangan. Karenanya, mesti ada pengurusan dan pemanfaatan agar muncul pemikiran yang komprehensif dan utuh dalam rangka memanfaatkan hutan yang majemuk untuk kesejahteraan masyarakat yang kebutuhannya juga majemuk.

Hal tersebut disampaikan Dr Soni Trison, Dosen IPB University dari Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan saat menjadi narasumber dalam Webinar Pengembangan Sumberdaya Alam Kawasan Perdesaan seri 3 pada (2/7). Disebutnya, jika melihat data potensi desa tahun 2006 dan 2008, jumlah desa hutan yang tersebar di 32 provinsi sebanyak 19.410 desa atau 26,7 persen. "Berdasarkan hasil overlay dengan peta hutan, terdapat 25.863 desa dari 70.429 atau 36,72 persen. Sementara jumlah penduduk desa hutan mencapai lebih dari 37 juta jiwa atau 17,1 persen dari penduduk Indonesia. Dan jumlah penduduk miskin yang bertempat tinggal di desa hutan sekitar 12 juta jiwa," jelasnya.

Dengan adanya perhutanan sosial di kawasan perdesaan, menurutnya menjadi hal positif bagi konteks pengembangan agribisnis. Ketika sudah existing agribisnis, lalu ditambah perhutanan sosial, maka selain menjadi petani agribisnis, mereka juga petani hutan, terlebih jika memang petani itu tadinya tidak punya lahan. Petani akan punya tambahan lahan untuk dikelola.

Dr Soni meyakini, pengembangan agribisnis di perhutanan sosial menjanjikan. Bahkan bisa saling melengkapi. Perhutanan sosial akan bisa meningkatkan ekonomi desa. "Bisa jadi proses konflik sekitar hutan akibat dari kurang intensifnya jaring pengaman sosial, terutama kaitannya dengan intensifikasi di luar kawasan. Dengan adanya kebijakan pemerintah, peran dari perhutanan sosial ini

sangat membantu pengembangan agribisnis hutan, selain mengembangkan pemasarannya, kelembagaannya. Banyak multiplier effect yang dihasilkan dengan integrasi agribisnis di perhutanan sosial," tegasnya.

Dr Sony mencontohkan, kontribusi perhutanan sosial di Jawa terhadap pengembangan agribisnis di kawasan pedesaan ternyata sudah bisa melahirkan produk-produk yang kaitannya dengan pangan, seperti tepung, kopi, jagung. Dengan sudah melibatkan 303.517 orang untuk di Pulau Jawa saja. "Di sinilah peluang agribisnis. Perhutanan sosial sangat membantu, kita bisa tidak kekurangan pangan kalau kita bisa mengoptimalkan," ungkapnya.

Namun demikian, kata Dr Soni, tentu ada 'pekerjaan rumah' besar yang perlu dibenahi agar pengembangan ini berjalan optimal. Menurutnya, area harus jelas. Perizinan perhutanan sosial yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ini 35 tahun. Jadi harus dikelola dan terjaga kontinuitasnya.

Kedua, lanjutnya, dengan pembenahan tata kelola atau manajemennya. Sumber daya manusia perlu ditingkatkan dengan sentuhan teknologi, relasi akses modal, pemasaran, dan perlunya pendampingan. Serta perkuat jejaring, kualitas produk dan packagingnya supaya bisa berkembang. Terutama di masa pandemi, digital marketing menjadi tuntutan.

Hal senada diungkapkan Drs Syahrul, MSi selaku Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan. Dalam sambutannya, ia mengungkapkan masyarakat yang mengelola perhutanan sosial masih kesulitan dalam soal perizinan, permodalan, ketersediaan pendanaan juga kebutuhan akan tenaga pendamping.

Dr Soni menegaskan bahwa perlu dukungan berbagai pihak dengan membangun sistem kolaborasi. "Mari sama-sama aktif dalam kebersamaan dan kerjasama penting dalam menjaga kelestarian hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

Turut hadir dalam webinar ini Anwar Sanusi, PhD, sekretaris Jenderal, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Drs Mulyadin Malik, MSi, Direktur Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan dan Dr Ir Apik Karyono, MSc, Plt Staf Ahli Menteri Bidang Pangan KLHK. **(Rz/Zul)**

Wacana Desa Presisi Hasil Gagasan Dosen IPB University dalam Uji Shahih RUU BUMDes



Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan unit usaha mandiri yang ada di desa seluruh Indonesia. Unit ini digadang-gadang bisa meningkatkan perekonomian kawasan perdesaan. Selain itu, BUMDes juga difokuskan untuk memberantas kemiskinan dan mengurangi ketimpangan.

“Posisi desa sangat strategis sebagai jantung dan akar ekonomi Indonesia. Kalau kita potret keseluruhan desa, hampir seluruh sumberdaya alam berada di wilayah perdesaan. Kita perlu memperkuat kelembagaan desa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ungkap Dr Sofyan Sjaf, Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) IPB University dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Uji Shahih Rancangan Undang-Undang BUMDes, di IPB International Convention Center (IICC), (2/7).

Kegiatan FGD ini dilaksanakan PSP3 IPB University bekerja sama dengan Panitia Perancang Undang-undang, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Hadir sebagai pemateri dua dosen IPB University yang masing-masing merupakan Tim Ahli RUU BUMDes, Dr Sofyan Sjaf dan Pakar Sosiologi Pedesaan, Dr Lala M Kolopaking, serta Kepala Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Bogor, Drs Ade Jaya Munadi.

Menurut Dr Sofyan Syaf, kelembagaan ekonomi desa sangat lemah, seperti tidak adanya pemetaan potensi desa secara digital dan pendirian unit usaha hanya sesuai kemauan kepala desa. Selama ini BUMDes merupakan bagian rezim dari kepala desa. Sehingga yang menjadi pengurus BUMDes tidak berdasar kualitas. Inilah salah satu penyebab kelemahan lembaga ekonomi desa tersebut.

“Selama ini PSP3 IPB selalu mendorong percepatan “Desa Presisi” yaitu desa yang terukur secara digital sesuai perkembangan era industri 4.0. Oleh karena itu harus ada pemetaan basis usaha kelayakan desa dan studi kelayakan desa, ini bertujuan untuk menentukan kegiatan usaha. Saya berharap suatu saat akan muncul 'kedaulatan desa' ketika ada unit usaha desa yang berkembang menjadi perseroan terbatas (PT), dan desa menjadi pemilik saham mayoritas,” ujar Sofyan Sjaf.

Sementara, Dr Lala M Kolopaking mengingatkan keterlambatan Indonesia dalam membangun kekuatan ekonomi desa. Desa rentan terhadap krisis meskipun selalu dibantu pendanaan dari pusat. Saat pendanaan ini berkurang, maka yang terjadi bukan hanya krisis tapi juga chaos. Ia menegaskan harus ada upaya untuk meretas stagnasi perkembangan BUMDes di era digital.

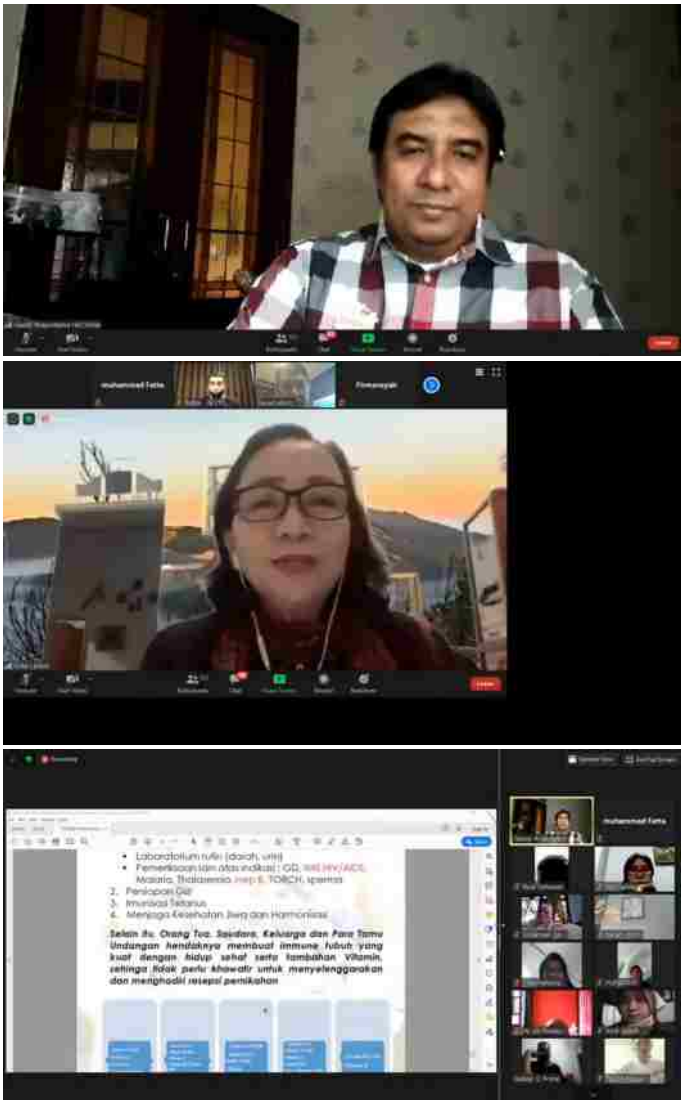
“Sangat diperlukan pergeseran perilaku warga desa dalam kebudayaan berekonomi dan berusaha dengan menguatkan perwujudan kewirausahaan sosial di Indonesia. Hal yang penting untuk dilakukan adalah memberikan pelayanan kepada warga desa dan sekaligus menjadi penggerak utama di desa,” ungkapnya.

Adapun Drs Ade Jaya Munadi mengungkapkan bahwa Kabupaten Bogor adalah 'kabupaten rasa provinsi'. Penduduk Kabupaten Bogor jumlahnya terbanyak jika dibandingkan dengan kabupaten lain, yaitu sebanyak 5,84 juta. Selain itu jumlah desa di Kabupaten Bogor terdapat 419 desa dengan 395 desa memiliki BUMDes.

Diskusi ditutup dengan kesimpulan Sofyan Sjaf bahwa pembangunan desa membutuhkan data yang kuat sebagai landasan. Kabupaten Bogor diharapkan menjadi wilayah pertama yang bisa menerapkan konsep desa presisi. Pasalnya Kabupaten Bogor memiliki potensi alam dan sumberdaya manusia yang potensial.

“Dengan konsep Desa Presisi, maka potensi ekonomi desa dapat terukur dengan akurasi tinggi. Bukan hanya sumberdaya alam, tapi juga peningkatan nilai tambah dari produk-produk pertanian bisa dihitung secara presisi, digital, dan bisa diakses secara luas melalui aplikasi,” tutup Sofyan Sjaf. **(Novan/RA)**

BLST Leaders Talk, Mempersiapkan Upacara Pernikahan di Masa New Normal



Pernikahan merupakan hal yang sakral baik secara agama ataupun budaya. Setiap daerah memiliki tradisi dan adat khasnya sendiri dalam merayakan pernikahan. Namun, masa pandemi membuat banyak perubahan dalam upacara pernikahan, utamanya adalah mengurangi jumlah orang yang hadir, bahkan beberapa pasangan terpaksa menunda upacara pernikahan hingga pandemi berakhir.

"Sampai saat ini kita belum tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Perayaan pernikahan selama masa pandemi harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat," ungkap Prof Dr Erika Laconi selaku Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan, IPB University dalam kegiatan BLST Leaders Talk, (2/7).

Menurutnya, pernikahan selama masa new normal bisa dilakukan tanpa harus melakukan penundaan. Ia menerangkan, selama pandemi jangan sampai membuat target dan agenda terhenti, tapi bisa menyesuaikan diri. Prof Erika sangat mengapresiasi PT Bogor Life Science and Technology (BLST), holding company milik IPB University yang mengadakan webinar terkait pernikahan di era new normal.

Hadir sebagai pemateri Gandy Priapatama, Ketua Umum Himpunan Perusahaan Penataan Acara Pernikahan (Hastana) Indonesia. Menurutnya, setiap wedding organizer (WO) harus menaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Seluruh kru WO wajib menggunakan masker, mencuci tangan secara berkala, dan seluruh lokasi kegiatan pernikahan sudah disemprot disinfektan.

"Salah satu konsep yang diterapkan adalah non touch service, yaitu mengurangi sentuhan fisik langsung. Selanjutnya adalah non touch communication dengan menggunakan bantuan alat komunikasi digital. Selain itu juga registrasi dilakukan secara online baik dengan barcode atau video registration," ungkap Gandy Priapatama.

Lebih lanjut Gandy menuturkan bahwa pemilik jasaboga juga harus memiliki sertifikat laik higiene sanitasi yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan setempat. Sementara pihak dekorasi juga harus membuat layout yang berkonsep sosial distancing. Adapun gedung atau tempat pernikahan hanya bisa diisi tidak boleh lebih dari setengah dari total kapasitas ruangan.

"Protokol kesehatan diterapkan di semua tempat, baik tim dekorasi, tim fotografer, tim catering, tim rias dan seluruh pihak yang terlibat. Antisipasi ini dilakukan agar penyebaran virus COVID-19 bisa dikurangi dan pasangan tidak perlu menunda pernikahan dan tetap dilaksanakan sesuai protokol yang ditetapkan," tutup Gandy Priapatama.

(Novan/RA)

Pentingnya Aspek Pertanahan Bagi Pembuatan Hutan Wakaf



PB University bersama Komunitas Hutan Wakaf Bogor kembali menyelenggarakan Webinar Hutan Wakaf sesi ketiga dengan tema Pertanahan Hutan Wakaf, (4/7).

Dalam kegiatan tersebut, dijabarkan mengenai pertanahan dan transaksi pembelian hutan wakaf.

Ir Augustijana Kartsasmita, MSc, Dosen IPB University dari Fakultas Kehutanan yang pernah bertugas di Kementerian Kehutanan menjelaskan mengenai kedudukan hutan wakaf dalam perundangan kehutanan di Indonesia. Menurutnya, saat ini hutan wakaf dilihat melalui perspektif Undang-Undang Perhutanan No. 41 tahun 1999 tentang Lahan di dalam Kawasan Hutan, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. 21 tahun 2019 tentang Hutan Hak dan Hutan Adat.

Berdasarkan UU tersebut, hutan wakaf termasuk ke dalam hutan hak. Pembelian di kawasan hutan negara tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan, hingga pemilihan lokasi pembelian hutan untuk wakaf perlu diperhatikan. Hutan wakaf harus berada di luar kawasan hutan negara dan tumbuh di atas tanah wakaf. Contohnya

pada salah satu lokasi hutan wakaf yang telah dikelola berada dekat dengan Taman Nasional Halimun Salak dan pemukiman warga. Ia juga menyebutkan poin penting dalam pembuatan hutan wakaf adalah berada di luar kawasan hutan negara dan menentukan fungsi hutan tersebut, melakukan penataan batas untuk keperluan sertifikasi, serta rencana pengelolaan selanjutnya.

Miftahul Jannah, Co-Founder Hutan Bogor menyebutkan, pentingnya pemilihan lokasi hutan wakaf menjadi salah satu kekhawatiran utama dalam pelaksanaannya. Ia menyebutkan bahwa ada tiga aspek penting dalam pemilihan lokasi hutan wakaf, yaitu aspek legal, aspek fisik dan biofisik, serta aspek manajemen.

Dalam aspek legal, misalnya, status kepemilikan lahan menjadi sangat penting, terlebih lagi yang berkaitan dengan perhutanan sosial. Hal tersebut menjadikan kelengkapan administrasi bagi pembelian hutan untuk wakaf menjadi penting agar tidak memakan waktu dan biaya lebih lanjut.

Kesesuaian dengan aturan desa setempat juga perlu diperhatikan karena sering munculnya perdebatan mengenai fungsi dari hutan wakaf tersebut bagi warga. Ia menjelaskan apabila penggunaan hutan wakaf dijelaskan dengan narasi yang baik kepada masyarakat sekitar akan lebih membuka potensi hutan tersebut.

"Dengan adanya hutan wakaf yang dapat difungsikan sebagai hutan kota, akan turut membantu pemerintah memenuhi target tersebut. Bila hutan dirasa menguntungkan, masyarakat akan ikut menjaga," ujarnya.

Dalam pembelian lahan bagi hutan wakaf, pertimbangan kemampuan dan kesesuaian lahan yang akan difungsikan, di samping aksesibilitas serta harga tanah yang disesuaikan dengan kemampuan sumber dana juga menjadi hal yang penting. **(MW/RA)**

Penjualan Produk Pertanian Online Naik 400 Persen Selama Pandemi COVID-19



Sandi Octa Susila adalah alumni IPB University dari Departemen Agronomi dan Hortikultura (AGH), Fakultas Pertanian yang saat ini tercatat aktif menduduki beberapa posisi penting diantaranya sebagai Komisaris Utama PT Bumi Parahyangan Investama, CEO PT Sinergi Tani Indonesia dan Direktur Utama Sub Terminal Agribisnis Cigombong Cianjur.

Pemuda kelahiran 1992 ini dinobatkan menjadi Ketua Umum Duta Petani Milenial oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada tahun 2019 serta pernah meraih Kick Andy Heroes pada tahun 2020 atas kiprahnya dalam memberdayakan 385 petani dan dedikasinya untuk pertanian Indonesia.

Usaha tani Sandi berupa produk hortikultura. Ia mengawali bisnis itu sejak masih mahasiswa di semester lima. Awal terjun di dunia bisnis, Sandi melihat banyak hasil panen kebun sayur tidak maksimal diperjualbelikan. Bermodalkan salah satu website jual beli, Sandi mendokumentasikan satu per satu hasil produksi ayahnya dan para petani di kampung halamannya. Dari situlah dia mendapat pengalaman pertama. "Lahan yang kami garap saat ini ada 100 hektar," ujarnya.

Karena kisah suksesnya ini, Owner Mitra Tani Parahyangan tersebut dihadirkan oleh Direktorat Kerjasama dan Hubungan Alumni dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Alumni IPB University untuk mengisi acara Alumni Insgihts yang bertajuk Getting Motivated and Learning to Succeed "Become a Techno-Sociopreneur". Ia berbagi cerita mengenai peluang pasar dan daya saing produk hortikultura di tengah turbulensi COVID-19.

"Era pandemi COVID-19 teknologi menjadi harga mati. Pertanian yang awalnya belum tersentuh teknologi, mau tidak mau harus melihat peluang itu," papar Sandi yang saat ini tercatat sebagai mahasiswa Pascasarjana Manajemen Bisnis, IPB University. Ia juga menuturkan jika di era COVID ini, pembelanjaan produk pertanian online secara keseluruhan naik 400 persen. Untuk produk sayuran tercatat naik sebesar 7.62 milyar rupiah per bulannya sementara buah-buah meningkat sebesar 360 juta di setiap bulannya.

Tingginya peluang itu, ia dan pemerintah Kabupaten Cianjur bersama-sama mendigitalisasi pertanian. Mereka membentuk Kedai Emak yang ditujukan untuk memudahkan para pembeli sekaligus menjaga harga produk petani agar hasil panen para petani tidak dihargai sangat rendah.

Selain usaha di bidang hortikultura, Sandi juga membina Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) yang terbuka bagi siapa saja. Pada level bisnis, dirinya mengembangkan UD Mitra Tani Parahyangan sebagai perusahaan pemasok bahan baku di hotel-hotel, restoran dan event-event nasional.

"Belajar di kelas adalah kewajiban setiap mahasiswa yang tidak bisa diganggu gugat sementara mengikuti organisasi adalah hak kita. Apakah mau dijalankan atau tidak hak kita tersebut," ujar mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Agronomi (Himagron) itu. Ia mengakui jika dari organisasi yang ia ikuti selama menjadi mahasiswa menjadi bekal saat ia bekerja saat ini. Ia berprinsip jika untuk berada di tangga teratas maka harus melewati tangga terbawah dulu. **(AMA/Zul)**

Ahli Kebakaran Hutan IPB University

Bicara Pencegahan Kebakaran Hutan Lahan Gambut



Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan, IPB University kembali menggelar webinar DSVK series bertemakan "Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut melalui Ground Water Level (GWL)", (3/7). Dalam paparannya, Prof Dr Bambang Hero Saharjo, dosen IPB University dari Divisi Perlindungan Hutan, Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan mengatakan bila pengendalian lahan gambut seperti pada kebun sawit dan sagu masih belum dilakukan dengan benar sehingga dapat menjadi bom waktu. Karakteristik gambut sangat penting diketahui agar pengelolaan serta pengendaliannya dapat efektif dilakukan. Hal tersebut juga dikarenakan pembuatan kanal atau rewetting belum dapat mengatasi kebakaran.

Menurutnya, pelacakan pergerakan sumber-sumber asap menggunakan data sentinel dapat dilakukan sebagai pencegahan. Tetapi fakta di lapangan, cara ini belum diimplementasikan. Seharusnya sekat kanal juga turut dibangun dan dipertahankan GWL-nya di bawah 40 sentimeter, namun belum pula dilakukan.

"Informasi lapangan yang lebih mikro didasarkan pada hasil penelitian dapat diandalkan untuk menjawab persoalan tersebut dan sejatinya harus digunakan. Jangan sampai nanti pada saat perumusan kita menggunakan ini semua, tetapi ketika di lapangan terserah orang lapangan," tukasnya.

Dr Erianto Indra Putra, dosen IPB University yang juga memiliki keahlian di bidang Kebakaran Hutan mengatakan

bahwa antisipasi kebakaran dapat dilakukan mulai titik api kecenderungan mulai terlihat. Misalnya sejak bulan Juni. Curah hujan yang semakin turun membuat lahan gambut semakin kering sehingga mudah terjadi kebakaran. Adanya gap antara GWL dan curah hujan menunjukkan bila lahan gambut kehilangan kapasitas menyerap dan menahan air hujan sehingga membuat lahan gambut tetap kering walaupun intensitas hujan tinggi. Sehingga ia merekomendasikan nilai -40 sentimeter dijadikan ambang batas untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan gambut terutama pada daerah terdegradasi. Daerah terdegradasi seperti di Lonrang, Jambi pun menjadi langganan kebakaran gambut sehingga menjadikan daerah tersebut rawan banjir.

Dr Asmadi Saad, dosen program studi Agroekoteknologi Universitas Jambi menjelaskan bila pemantauan data secara real-time menjadi krusial untuk menentukan keputusan secara cepat dan tepat sebelum kebakaran terjadi. Monitoring GWL di lapangan dapat dilakukan secara manual, dengan logger ataupun telemetri. Sistem SESAME menggunakan data logger disebutkan menjadi salah satu sistem monitoring terbaik karena dapat dilakukan melalui jarak jauh dan dipantau secara bersamaan.

Sementara Dr Sigit Sutikno, dosen Teknik Sipil dan Kepala Pusat Studi Bencana Universitas Riau mengatakan bahwa di Riau sendiri, Karhutla terjadi mengikuti dua periode musim kemarau dalam setahun. Kondisi neraca air yang defisit disebutkan menjadi biang dari terjadinya Karhutla. "Langkah pencegahan yang dilakukan adalah dengan menampung air semaksimal mungkin agar lahan gambut tetap basah di musim kering. Begitu pula dengan monitoring GWL soil moisture, dan suhu secara real time agar dapat memprediksikan kemungkinan terjadinya karhutla," ujarnya. (MW/Zul)

Tatiek Kencanawati, Perempuan Pemberdaya Desa dari IPB University



Series terakhir dari Alumni Insights yang bertajuk *Getting Motivated and Learning to Succeed* "Become a Techno-Sociopreneur" menghadirkan Tatiek Kencanawati, Alumni IPB University yang merupakan owner dari Kampoeng Wisata Bisnis sekaligus Direktur Zakat Community Development Badan Amil Nasional (BAZNAS). Acara yang ditujukan bagi para mahasiswa IPB University yang akan terjun melangsungkan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) itu diselenggarakan oleh Direktorat Kerjasama dan Hubungan Alumni bekerjasama dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Alumni IPB University, (3/7).

"Seorang sociopreneur memiliki kepekaan dan keinginan yang besar untuk mengubah nasib manusia. Sociopreneur adalah aktivitas berbagi kebahagiaan ke masyarakat atau orang lain, artinya adalah sebuah profesi yang membahagiakan. Seseorang wirausahawan sosial juga akan menjadi pribadi yang memberikan jalan keluar dari berbagai permasalahan. Sebagai pembuka jalan, kemudian menunjukkan arah dan memberi stimulus bagi masyarakat untuk maju dan bangkit," jelas Tatiek.

Bedanya antara entrepreneurship dengan social entrepreneurship, lanjutnya, ada di ukuran keberhasilan dan mekanisme kerjanya. Entrepreneurship kehasilannya diukur dari keuangan dan materi tertentu serta mekanisme kerjanya adalah berusaha memahami pasar agar dapat menghasilkan produk dan jasa sekaligus profit bagi pengusaha. Sementara keberhasilan social entrepreneurship dilihat dari seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan mampu melakukan perubahan sosial ke arah yang positif. Adapun mekanisme kerjanya yaitu dengan memberdayakan masyarakat yang kurang beruntung agar berkesempatan mencapai tingkat kesejahteraan.

Contoh pemberdayaan masyarakat yang sudah ia ciptakan adalah konservasi mangrove dan budidaya kerang di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro di Desa Lubuk Bangkar, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Pemberdayaan lainnya seperti Pemberdayaan Perempuan Ecofashion Batik Sumurgung, di Desa Sumurgung, Tuban, Jawa Timur, pengolahan Kelapa Terpadu Kelurahan Banteng Utara, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan, serta owner dari Kampoeng Wisata Bisnis Tegalwaru, Bogor.

Ia menjelaskan Desa Tegalwaru terletak di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Masyarakat di kampung ini mempunyai berbagai usaha rumahan seperti: wayang golek, golok, pacul, selai kelapa, nata de coco, rumah herbal, handycraft, ternak domba, ternak ikan, dan tas. Melalui bisnisnya itu, Tatiek mempromosikan usaha ini sebagai ikon kampung wisata bisnis. Sampai saat ini, sudah lebih dari 15.000 pengunjung dari berbagai tempat datang dan belajar bisnis sesuai dengan minat masing-masing. Tentu hal ini memberikan tambahan income bagi para pelaku usaha karena hubungan yang intens dan terbukanya pasar dengan berbagai pihak.

Kampung Tegalwaru kini menjelma sebagai kampung wisata yang mampu menyedot pengunjung dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sekolah, mahasiswa, ibu-ibu PKK, majelis taklim, hingga para pebisnis dari seluruh Indonesia. Para pengunjung bisa menikmati nuansa pedesaan di Tegalwaru, sekaligus melihat langsung proses produksi berbagai lini bisnis berbasis home industry.

"Ada beberapa idealisme seorang social entrepreneur di antaranya dapat menambal lubang-lubang permasalahan sosial yang belum mampu diselesaikan oleh pemerintah, mengakselerasi program pembangunan sehingga berjalan lebih cepat, menambah level kebahagiaan dan kesempatan untuk menyalurkan gairah untuk membahagiakan orang lain, melambungkan beragam potensi wilayah yang belum digarap oleh pemerintah, mendorong dan menginspirasi warga lainnya yang belum bergerak dan cenderung hanya bisa mengoreksi dan mencari kambing hitam dan menjadi individu yang rela berkorban, "ujarnya. **(AMA/RA)**

Alumni IPB University: Karir sebagai Food Technologist Sangat Menjanjikan



Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan (ITP), Fakultas Teknologi Pertanian, IPB University menggelar acara bincang-bincang mengenai kiprah ahli teknologi pangan di industri dan tata cara menjadi food technologist bersama narasumber dari industri pangan dan dosen ITP IPB, secara online, 4/7. Acara ini diikuti oleh mahasiswa, dosen dan masyarakat umum.

Galih Nugroho, Alumni IPB University yang saat ini menjabat sebagai Production Manager di PT Nutrifood Indonesia menjelaskan tentang tugas utama seorang food technologist. Ia mengatakan lulusan teknologi pangan dapat masuk ke industri sebagai food technologist melalui private sector, public sector ataupun third sector. "Dengan pesatnya perkembangan industri pangan di Indonesia, sektor ini berkontribusi sebesar 7 persen bagi perekonomian nasional. Hal ini menjadikan karir sebagai food technologist sangat menjanjikan," tuturnya.

Food technologist, lanjutnya, dapat berkecimpung di berbagai area industri pangan, mulai dari raw material, hotel, restoran, kemasan, quality auditor hingga produk jadi. Saat pandemi seperti ini, ia mengatakan, sanitasi di dalam area pabrik juga menjadi penting, food technologist pun diandalkan untuk mengatasi hal tersebut.

Ia juga bercerita, pada divisi research and development, seorang food technologist bertugas untuk meracik formula produk mulai dari segi harga hingga kualitas. Menurutnya, pengetahuan terhadap gizi dan produk pangan menjadikan lulusan teknologi pangan dapat berkembang dengan baik dalam branding produk. Alumni teknologi pangan juga dapat berkontribusi melalui konten sosial media mengenai teknologi pangan bagi khalayak umum, termasuk iklan. Selain itu public sector seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Majelis Ulama Indonesia (MUI) hingga sektor non government organization (NGO) seperti World Bank juga membutuhkan food technologist.

Sementara, Dr Dase Hunaefi, Dosen IPB University dari Departemen ITP mengatakan program studi teknologi pangan di IPB University adalah pilihan yang sangat istimewa. Mulai dari kualitas dosen hingga fasilitasnya sangat mendukung bagi perkembangan mahasiswanya. Adanya kelas internasional dan terbuka lebarnya beasiswa hingga program student exchange menjadikan program studi tersebut menjadi salah satu program studi favorit di IPB University.

Ia menyebutkan bahwa program studi tersebut juga telah diakui secara internasional oleh Institute of Food Technologist (IFT). Tak hanya melalui jalur reguler sebagaimana jalur masuk IPB pada umumnya, calon mahasiswa juga dapat masuk ke program studi Teknologi Pangan ini melalui jalur "tiket emas" melalui Lomba Cepat Tepat Ilmu Pangan yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Teknologi Pangan (HIMITEPA).

"Harapannya, informasi yang disampaikan melalui Meet the Food Technologist ini bisa memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai program studi teknologi pangan di IPB University," terang Ketua Departemen ITP IPB University, Feri Kusnandar. **(MW/RA)**